

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN DI NUSA TENGGARA DAN PAPUA

I Nyoman Giri Adi Saputra¹

Ni Nyoman Yuliarmi²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (UNUD), Bali, Indonesia

¹Email: giriadisaputra@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan (1) untuk menganalisis pengaruh produk domestik regional bruto, tingkat pengangguran, investasi, dan inflasi secara simultan terhadap kemiskinan di Nusa Tenggara dan Papua, (2) untuk menganalisis pengaruh produk domestik regional bruto, tingkat pengangguran, investasi, dan inflasi secara parsial terhadap kemiskinan di Nusa Tenggara dan Papua. (3) untuk mengetahui peran inflasi memoderasi pengaruh investasi terhadap kemiskinan di Nusa Tenggara dan Papua. Penelitian ini dilakukan di Nusa Tenggara dan Papua menggunakan tiga provinsi sebagai titik pengamatan dengan rentang waktu tahun 2007 hingga 2018 dengan besar ukuran sampel yaitu sebanyak 36 pengamatan dengan metode teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah moderasi regresi analisis. Hasil analisis data secara parsial menunjukkan (1) Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, Pengangguran secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. (2) Investasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan (3) Inflasi secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. (4) Inflasi memoderasi pengaruh investasi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia Timur.

Kata Kunci: produk domestik regional bruto, pengangguran, investasi, inflasi, tingkat kemiskinan

ABSTRACT

This study aims (1) to analyze the effect of gross regional domestic product, unemployment rate, investment and inflation simultaneously on poverty in Nusa Tenggara and Papua, (2) to analyze the effect of gross regional domestic product, unemployment rate, investment, and inflation simultaneously. partial to poverty in Nusa Tenggara and Papua. (3) to determine the role of inflation in moderating the effect of investment on poverty in Nusa Tenggara and Papua. This research was conducted in Nusa Tenggara and Papua using three provinces as observation points with a time span from 2007 to 2018 with a large sample size of 36 observations with the analytical technique method used in this study is moderation regression analysis. The results of partial data analysis show (1) Gross Regional Domestic Product has a negative and significant effect on the poverty level, unemployment partially has a negative and significant effect on the poverty level. (2) Partial investment has a positive and significant effect on the poverty level (3) Inflation partially has a negative and significant effect on the poverty level. (4) Inflation moderates the effect of investment on poverty levels in Eastern Indonesia.

Keywords: gross regional domestic product, unemployment, investment, inflation, poverty level

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh. Kemiskinan sering dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti pangan, perumahan, pakaian, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Tinjauan kemiskinan dari dimensi ekonomi diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk menndapatkan mata pencaharian yang mapan dan memberikan penghasilan yang layak untuk menunjang hidupnya. Definisi tentang kemiskinan telah mengalami perluasan, seiring dengan semakin kompleksnya faktor penyebab, indikator maupun permasalahan lainnya yang melingkupinya (Mahsunah, Durrotul. 2013)

Di Nusa Tenggara dan Papua merupakan contoh provinsi yang masih menghadapi permasalahan kemiskinan dan penanggulangan kemiskinan. Masih tingginya angka kemiskinan disetiap Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa tenggara dan Papua, Dalam perbandingan rata- rata tingkat kemiskinan di seluruh provinsi di Indonesia. Kondisi sebagian besar alam di Nusa Tenggara dan Papua tandus dan gersang. Kekeringan dan rawan pangan seolah menjadi bencana rutin yang dihadapi warga Nusa Tenggara dan Papua hampir setiap tahun. Kemiskinan, kasus gizi buruk, angka putus sekolah, serta akses fasilitas kesehatan yang kurang memadai pada akhirnya menjadi mata rantai lanjutan dari persoalan itu. Sumber Daya Alam (SDA) yang cukup besar dan beragam yang tersebar di setiap daerah, namun sampai saat ini

potensi setiap sektor tersebut belum secara optimal dapat memberikan nilai tambah yang signifikan untuk mensejahterakan rakyat dan daerah Nusa Tenggara dan Papua. Hal ini sebabkan karena ketimpangan pemerataan pembangunan, Presiden Joko Widodo mengakui bahwa adanya ketimpangan pemerataan pembangunan, beliau mengatakan bahwa ketimpangan sangat jelas sekali di Nusa Tenggara dan Papua (Bappeda. 2018). Untuk itu maka pembangunan yang dilaksanakan harus didasarkan kepada azas pemerataan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun mereka berada dan masih kurangnya investasi yang dilakukan untuk penurunan angka kemiskinan di Nusa Tenggara dan Papua. Kondisi ini menyebabkan berbagai persoalan di daerah itu mulai dari masalah kesehatan, kualitas sumber daya manusia, pengangguran dan persoalan sosial lainnya

Kemiskinan tidak lagi hanya dianggap sebagai dimensi ekonomi melainkan telah meluas hingga ke dimensi sosial, kesehatan, pendidikan, dan politik. Kemiskinan dalam arti luas dapat diartikan sebagai keterbatasan yang disandang oleh seseorang, sebuah keluarga, sebuah komunitas, atau bahkan sebuah Negara yang menyebabkan terjadinya ketidaknyamanan dalam kehidupan, terancamnya penegakan hak dan keadilan, serta suramnya masa depan Bangsa dan Negara (Maipita, Indra, 2014). Kemiskinan telah menjadi perhatian utama dalam perkembangan kebijakan sosial (Alcock, 2012). Seseorang dikatakan miskin bila dia belum bisa mencukupi kebutuhannya atau belum berpenghasilan (Yudha, 2013). Definisi kemiskinan menurut orang yang tergolong miskin yaitu merupakan sesuatu yang nyata ada dalam kehidupan

mereka sehari-hari, karena mereka itu merasakan dan menjalani sendiri bagaimana mereka hidup dalam kemiskinan (Suliswanto, 2010).

Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,58 juta orang atau 10,12 persen pada September 2017, angka itu turun jika dibandingkan dengan Maret yang sebesar 27,77 juta orang atau 10,64 persen (BPS, 2018). Tingkat kemiskinan menurut pulau di Indonesia sampai September 2018 masih terpusat di Nusa Tenggara dan Papua, masalah kesejahteraan yang tidak terpenuhi dan sangat tampak. Fenomena kemiskinan telah berlangsung sejak lama, walaupun telah dilakukan berbagai upaya dalam menanggulangnya masalah kemiskinan memerlukan penanggulangan yang tepat dan berkelanjutan. Pemerintah daerah selama ini telah memberikan perhatian yang sangat besar pada masalah pengentasan kemiskinan dengan melakukan program-program pembangunan (Bappeda, 2016). Berikut jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2014-2018 yang disajikan dalam bentuk Tabel 1.1.

Tabel 1.
Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2014-2018 (Persentase)

Provinsi	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Aceh	16.98	17.11	16.43	15.92	15.68
Sumatra Utara	9.85	10.79	10.27	9.28	8.94
Sumatra Barat	6.89	6.71	7.14	6.75	6.55
Riau	7.99	8.82	7.67	7.41	7.21
Jambi	8.39	9.12	8.37	7.90	7.85
Sumatra Selatan	13.62	13.77	13.39	13.10	12.82
Bengkulu	17.09	17.16	17.03	15.59	15.41
Lampung	14.21	13.53	13.86	13.04	13.01
KEP.Bangkabelitung	4.97	4.83	5.04	5.30	4.77
KEP. Riau	6.40	5.78	5.84	6.13	5.83
DKI Jakarta	4.09	3.61	3.75	3.78	3.55
Jawa Barat	9.18	9.57	8.77	7.83	7.25
Jawa Tengah	13.58	13.32	13.19	12.23	11.19
DI Yogyakarta	14.55	13.16	13.10	12.36	11.81
Jawa Timur	12.28	12.28	11.85	11.20	10.85
Banten	5.51	5.75	5.36	5.59	5.25
Bali	4.76	5.25	4.15	4.14	3.91
Nusa Tenggara Barat	17.05	16.54	16.02	15.05	14.63
Nusa Tenggara Timur	19.60	22.58	22.01	21.38	21.03
Kalimantan Barat	8.07	8.44	7.87	7.86	7.37
Kalimantan Tengah	6.07	5.91	5.36	5.26	5.10
Kalimantan Selatan	4.81	4.72	4.52	4.70	4.65
Kalimantan Timur	6.31	6.10	6.11	6.08	6.06
Kalimantan Utara	6.24	6.32	6.99	6.96	6.86
Sulawesi Utara	8.26	8.98	8.20	7.90	7.59
Sulawesi Tengah	13.61	14.07	14.09	14.22	13.69
Sulawesi Selatan	9.54	10.12	9.24	9.48	8.87
Sulawesi Tenggara	12.77	13.74	12.77	11.97	11.32
Gorontalo	17.41	18.16	17.63	17.14	15.83
Sulawesi Barat	12.05	11.90	11.19	11.18	11.22
Maluku	18.44	19.36	19.26	18.29	17.85
Maluku Utara	7.41	6.22	6.41	6.44	6.62
Papua	27.80	28.40	28.40	27.76	27.43
Papua Barat	26.26	25.73	24.88	23.12	22.66
Indonesia	10.96	11.13	10.70	10.12	9.66

Sumber: BPS RI, 2019

Tabel 1 menyajikan data mengenai jumlah penduduk miskin menurut provinsi pada tahun 2012 hingga 2018. Selama periode tersebut, penduduk miskin berpusat di Pulau Jawa. Hal ini bukanlah hal yang luar biasa, mengingat berdasarkan hasil survei penduduk antar sensus (SUPAS, 2015) lebih dari 56 persen penduduk Indonesia tinggal

di Pulau Jawa. Menurut BPS Indonesia memiliki pekerjaan rumah yang besar di Nusa Tenggara dan Papua mengingat daerah tersebut tercatat masih memiliki persentase kemiskinan tertinggi di Indonesia yang meliputi Nusa Tenggara, , Papua. BPS berharap berbagai pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan pemerintah di Nusa Tenggara dan Papua bisa menekan pertumbuhan penduduk miskin, oleh karena itu pembangunan di Nusa Tenggara dan Papua diharapkan berimbang positif terhadap pengurangan penduduk miskin (BPS RI, 2018).

Tanpa adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menyebabkan sulitnya menciptakan lapangan kerja baru sehingga menyebabkan tingkat pengangguran yang meningkat (Mekahsari, 2012). Untuk menjalankan roda perekonomian pemerintah membutuhkan modal yang diantaranya didapat dari potensi ekonomi daerah serta transfer yang diberikan dari pemerintah pusat (Hendra, 2016). Sejalan dengan Margareni (2016) dan Sirilius (2017) guna menurunkan kemiskinan dibutuhkan perekonomian yang baik, karena pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan. Dalam proses pembangunan ekonomi yang tidak diimbangi dengan azas keadilan dan pemerataan memiliki dampaknya langsung yaitu timbulnya ketimpangan pembangunan antar wilayah. Ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut, terlihat dengan adanya wilayah yang maju dengan wilayah yang terkebelakang atau kurang maju. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda, oleh karena itu, tidaklah mengherankan bilamana pada setiap daerah

biasanya terdapat wilayah maju (*developed region*) dan wilayah relatif terbelakang (*under developed region*) (Sjafrizal, 2012).

Terjadinya ketimpangan ekonomi antar wilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat ketimpangan kesejahteraan masyarakat antar wilayah (Fajrii, 2016). Penyebab ketimpangan ekonomi antar wilayah juga disebabkan oleh perbedaan kandungan sumber daya alam. Perbedaan kandungan sumber daya alam ini jelas akan mempengaruhi kegiatan produksi daerah yang bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumber daya alam cukup banyak akan memproduksi barang dan jasa tertentu dengan biaya relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih sedikit, Kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi lebih cepat. Sedangkan daerah lain mempunyai kandungan sumber daya alam lebih kecil hanya akan memproduksi barang dan jasa dengan biaya produksi lebih tinggi sehingga daya saingnya menjadi lemah. Kondisi tersebut selanjutnya menyebabkan daerah yang bersangkutan cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lambat (Sjafrizal, 2014). Menurut Li (2008) pentingnya peningkatan keterampilan dan teknologi paling jelas ditunjukkan di Asia termasuk Indonesia. Selain itu Solow (1956) menekankan faktor-faktor produksi seperti modal dan tenaga kerja serta teknologi merupakan faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Inovasi juga diperlukan dalam upaya untuk meningkatkan produktivitas (Carvalho and Avellar, 2016). Guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi diperlukan pembangunan manusia dan sebaliknya, satu sisi pembangunan manusia yang berkelanjutan perlu didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang memadai dan di sisi lain pertumbuhan

ekonomi yang berkelanjutan perlu didukung ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai (Rejekiingsih, 2012).

Presiden Joko Widodo mengakui bahwa adanya ketimpangan pemerataan pembangunan, beliau mengatakan bahwa ketimpangan sangat jelas sekali di Nusa Tenggara dan Papua. Untuk itu maka pembangunan yang dilaksanakan harus didasarkan kepada azas pemerataan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun mereka berada. Pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlangsung dari tahun ke tahun. Beberapa pendapat lain mengatakan pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan pendapatan masyarakat secara keseluruhan sebagai cermin kenaikan seluruh nilai tambah yang tercipta di suatu wilayah (Arsyad, Lincoln. 1999). Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan taraf hidup diukur dengan output riil per orang (BPS, 2016), untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi harus membandingkan angka pendapatan nasional yang dihitung berdasarkan nilai riil. Perubahan pendapatan nasional hanya semata-mata disebabkan oleh perubahan dalam tingkat kegiatan ekonomi atau dengan kata lain pertumbuhan baru tercapai apabila jumlah barang dan jasa yang dihasilkan bertambah besar pada tahun berikutnya. Untuk mengetahui apakah perekonomian mengalami pertumbuhan, harus dibedakan PDRB riil satu tahun dengan PDRB riil tahun sebelumnya (Sadono Sukirno, 2010).

Arus globalisasi ekonomi perdagangan terus berkembang memberikan pengaruh serta hambatan terhadap aktivitas perdagangan yang harus dihadapi oleh semua negara termasuk Indonesia. Perekonomian global yang terintegrasi, spesialisasi

dalam perdagangan merupakan strategi yang semakin menonjol (Coxhead and Li, 2008). Pertumbuhan ekonomi dapat dinilai sebagai dampak kebijaksanaan pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Proses pembangunan memerlukan pendapatan yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat, dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat di masing-masing wilayah mengindikasikan bahwa pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga mampu mengurangi kemiskinan. Secara langsung, hal ini menunjukkan pertumbuhan itu perlu dipastikan terjadi disektor-sektor pertanian atau sektor yang padat karya. Adapun secara tidak langsung, diperlukan pemerintah yang cukup efektif mendistribusikan manfaat pertumbuhan yang mungkin didapatkan dari sektor modern seperti jasa yang padat modal (Dwi Wahyuniarti, 2008).

Pada tingkat dunia, inflasi merupakan tolak ukur kinerja perekonomian suatu negara apakah perekonomian suatu negara tersebut dalam keadaan baik atau buruk. Fenomena inflasi terus terjadi di semua negara, di beberapa negara memiliki dampak yang kuat sehingga sangat mempengaruhi tingkat lapangan kerja, tingkat harga, barang penggunaan harian, tingkat bunga diskonto dan biaya pengeluaran (Muhammad Umar, 2013). Totonchi (2011), menyatakan Inflasi merupakan salah satu alat untuk menentukan kondisi perekonomian suatu negara. Kestabilan perekonomian akan terganggu apabila inflasi terlalu tinggi sehingga akan menekan daya beli masyarakat. Sebaliknya, inflasi yang terlalu rendah merupakan indikator meningkatkan daya beli masyarakat yang akan menekan laju pertumbuhan ekonomi. Menurut Rio dan Dian (2013) secara keseluruhan inflasi di Indonesia masih merupakan inflasi gabungan

(*Mix-inflation*). Inflasi merupakan salah satu faktor yang dianggap menyebabkan tingkat kemiskinan di Indonesia timur dapat meningkat, karena jika inflasi terjadi terlalu tinggi harga barang-barang umum akan merangsek naik, hal tersebut membuat masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan jika hal tersebut terjadi akan membuat masyarakat jauh dari kata sejahtera (Halim, dkk 2010).

Inflasi di Indonesia bukan merupakan suatu fenomena jangka pendek saja dan terjadi berdasarkan kondisi-kondisi tertentu, tetapi seperti halnya yang umum terjadi di negara-negara yang sedang berkembang lainnya, masalah inflasi di Indonesia lebih pada masalah inflasi jangka panjang. Bila inflasi dikaitkan dengan kemiskinan, apabila laju inflasi meningkat, maka akan diikuti oleh peningkatan pada batas garis kemiskinan. Sebagai akibat dari peningkatan laju inflasi akan dapat mendorong terjadinya peningkatan pada jumlah penduduk miskin. Daya beli masyarakat berpendapatan rendah akan semakin merosot, makin tinggi tingkat inflasi makin banyak pula jumlah penduduk miskin, sehingga Imelia (2012) hubungan antara inflasi dan kemiskinan bersifat positif.

Mengurangi kemiskinan di Nusa Tenggara dan Papua perlu adanya investasi sebagai sumber pembangunan ekonomi, modernisasi, pertumbuhan pendapatan, ketenagakerjaan, pengurangan kemiskinan perlu mendapatkan perhatiannya serius. Pada kenyataan bahwa investasi merupakan komponen penting dalam pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi (Adnan, 2010). Investasi memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi, penting untuk menentukan strategi investasi

yang akan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan (Triyodo, 1996). Perkembangan ekonomi daerah sangat berpengaruh pada tingkat kemiskinan penduduk. Atas dasar itu, percepatan pembangunan ekonomi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat merupakan salah satu upaya strategis penurunan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi merupakan unsur penting dalam proses pembangunan wilayah yang masih merupakan target utama dalam rencana pembangunan disamping pembangunan sosial (Mudrajad Kuncoro, 1997).

Kemiskinan juga dapat diakibatkan oleh tingginya tingkat pengangguran, efek buruk dari pengangguran adalah akan mengurangi pendapatan masyarakat yang kemudian akan mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Akibat pengangguran di suatu negara sangat buruk, karena dapat memicu terjadinya kekacauan politik dan sosial yang dapat menimbulkan efek yang buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan rencana pembangunan ekonomi dalam jangka panjang (Sukirno, 2008).

Masalah pengangguran terjadi karena tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat namun pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat. Besarnya tingkat pengangguran mencerminkan bahwa kurang berhasilnya pembangunan di suatu negara. Pengangguran dapat mempengaruhi kemiskinan dengan berbagai cara (Tambunan, 2001), namun upaya untuk menurunkan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan merupakan hal yang penting. Jika masyarakat tidak menganggur berarti masyarakat tersebut mempunyai pekerjaan dan berpenghasilan, dengan penghasilan yang dimiliki

maka diharapkan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika kebutuhan hidup terpenuhi maka tidak akan ada masyarakat miskin. Tingkat pengangguran yang rendah dengan kesempatan kerja yang ada tinggi, maka tingkat kemiskinan akan menjadi rendah (Alghofari, Farid, 2010).

Kemiskinan dalam pembangunan ekonomi yang lebih tinggi dibutuhkan pertumbuhan produksi output yang merangsang pertumbuhan ekspor (Zang dan Baimbridge, 2012). Penelitian Zamzami (2015) yang berjudul "Analisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten nangan raya" menyatakan bahwa Produk domestik regional bruto berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, Artinya apabila PDRB meningkat maka akan mampu menurunkan jumlah penduduk miskin. Ada hubungan yang erat antara tingginya tingkat pengangguran, meningkatnya kemiskinan, Bagi sebagian besar mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau hanya bekerja paruh waktu (part time) selalu berada di antara kelompok masyarakat yang sangat miskin, mereka yang bekerja dengan bayaran tetap di sektor pemerintah dan swasta biasanya termasuk diantara kelompok masyarakat kelas menengah ke atas (Arsyad Lincoln, 2004)

Jumlah penduduk yang tinggi akan menyebabkan tingginya jumlah pengangguran dan jumlah kemiskinan meningkat apabila tidak didukung dengan penyediaan lapangan pekerjaan yang memadai bagi masyarakat usia kerja, Apabila jumlah lapangan pekerjaan semakin banyak akan diikuti dengan banyaknya jumlah tenaga kerja yang terserap, Apabila tidak tersedia lapangan pekerjaan yang memadai akan meningkatkan jumlah kemiskinan yang berakibat pada tingkat kesejahteraan

masyarakat menjadi menurun, Penelitian Meinny Kolibu (2019) yang berjudul “Pengaruh Tingkat Inflasi, Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara” menyatakan bahwa jumlah pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Investasi memiliki pengaruh yang besar terhadap kemiskinan yang ada pada suatu negara, karena dengan banyaknya investasi dari investor melalui pengembangan usaha-usaha yang berskala makro atau pun mikro, tentunya akan memerlukan tenaga kerja untuk mengembangkan usahanya tersebut, sehingga secara tidak langsung terdapat lapangan pekerjaan bagi masyarakat, tentunya hal ini juga akan berdampak terhadap pengurangan jumlah masyarakat miskin, karena masyarakat telah memiliki pekerjaan yang pada nantinya mereka akan mendapatkan penghasilan, sehingga kehidupan perekonomian masyarakat dapat sebagai efek adanya investasi. Penelitian Paramita (2016) yang berjudul “ Pengaruh Investasi dan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Kemiskinan Di Provinsi Bali” menyatakan Investasi berkolerasi negatif terhadap tingkat kemiskinan.

Inflasi memiliki pengaruh yang besar terhadap kemiskinan. Pada kejadian di beberapa negara inflasi telah merosot ke tingkat yang berisiko, sehingga mengganggu fungsi normal perekonomian (Clark, 2004). (Di Tella,2001) . Apabila harga-harga naik secara drastis dalam periode tertentu maka tingkat kemiskinan juga akan naik, Tingkat kemiskinan naik bila masyarakat tingkat upah nya tetap, jika tingkat upahnya tetap sedangkan harga barang-barang naik, masyarakat yang awalnya dapat memenuhi

kebutuhan karena terjadinya inflasi yang mengakibatkan masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan primiernya. Penelitian Imelia (2012) yang berjudul “ Pengaruh Inflasi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jambi” menyatakan inflasi memiliki hubungan pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Inflasi merupakan determinan makro ekonomi bagi perubahan kondisi kemiskinan disuatu negara.

Investasi merupakan penghubung yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan (Ocaya et al, 2012), Penambahan stok bangunan dan peralatan penting lainnya akan meningkatkan output potensial suatu bangsa dan merangsang pertumbuhan ekonomi untuk jangka panjang. Investasi memiliki peran aktif dalam menentukan tingkat output dan laju pertumbuhan output tergantung pada laju inflasi, Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran penanam modal untuk barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. (Sukirno 2000).

Investasi dalam bidang perekonomian berpengaruh serta mendorong naik turunnya tingkat perekonomian dari suatu negara, kondisi ini terjadi karena dengan adanya investasi akan terjadi peningkatan produksi dan kesempatan kerja. Investasi juga dapat diartikan sebagai pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan secara keseluruhan untuk mendirikan atau memperluas usaha yang telah ada, dimana investasi ini pada nanti memiliki tujuan yang dapat memberikan atau memperoleh keuntungan bagi para investor maupun pemerintah. Menurut Boediono dalam (Rustiono, 2008) investasi merupakan pengeluaran oleh sektor produsen dimana yang bertindak sebagai

produsen adalah pihak swasta, untuk pembelian barang dan jasa untuk menambah stok yang digunakan atau untuk perluasan pabrik.

Investasi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh para penanam modal yang menyangkut penggunaan sumber-sumber barang modal seperti peralatan, gedung, peralatan produksi dan mesin-mesin baru lainnya atau persediaan yang diharapkan akan memberikan keuntungan dari investasi tersebut. Investasi menghimpun akumulasi modal dengan membangun sejumlah gedung dan peralatan yang berguna bagi kegiatan produktif, maka output potensial suatu bangsa akan bertambah dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang juga akan meningkat, Investasi memerankan peranan penting dalam menentukan jumlah output dan pendapatan. Kekuatan ekonomi utama yang menentukan investasi adalah hasil biaya investasi yang ditentukan oleh kebijakan tingkat bunga dan pajak, serta harapan mengenai masa depan. Faktor penentu investasi sangat tergantung pada situasi di masa depan yang sulit untuk diramalkan, maka investasi merupakan komponen yang paling mudah berubah (Rustiono, 2008)

Kegiatan investasi akan menimbulkan dua efek, yaitu efek langsung terhadap pengeluaran agregat dan efek terhadap kapasitas produksi. efek langsung terhadap pengeluaran agregat dan efek terhadap kapasitas produksi. Efek langsung dari pengeluaran investasi terjadi pada sisi permintaan agregat bila pengeluaran investasi meningkat, yang kemudian akan meningkatkan kapasitas pendapatan nasional atau daerah (Jhingan ML, 2000).

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedang PDRB atas dasar harga

konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar dimana dalam perhitungan ini digunakan tahun 2000 PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, sedangkan produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku digunakan untuk menunjukkan besarnya struktur perekonomian dan peranan sektor ekonomi (BPS, 2012).

PDRB merupakan penjumlahan nilai output bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah provinsi, kabupaten atau kota, dan dalam satu kurung waktu tertentu. Produk domestik regional bruto adalah jumlah dari nilai tambah bruto oleh semua produsen dalam perekonomian ditambah pajak produksi, dan dikurangi subsidi apapun yang tidak termasuk dalam nilai produksi, penghitungan produk domestik regional bruto menggunakan dua macam harga yaitu harga berlaku dan harga konstan. Produk domestik regional bruto atas harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun bersangkutan, sementara PDRB atas dasar harga konstan dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar dan saat ini menggunakan tahun 2000 (BPS, 2012).

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilakukan di lingkup wilayah Indonesia, yang dimana penelitian ini dititikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Dipilihnya lokasi ini karena adanya ketimpangan pemerataan pembangunan dan kemiskinan yang tinggi di Nusa Tenggara dan Papua. Titik Pengamatan dalam

penelitian ini ada di tiga provinsi di Nusa Tenggara dan Papua dalam rentang waktu 2007 hingga 2018 (12 tahun) maka besarnya $3 \times 12 = 36$ sampel

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode observasi non perilaku. Adapun metode pengumpulan data menggunakan observasi non perilaku, yaitu teknik pengamatan secara tidak langsung atau peneliti sebagai pengamat independen yang melakukan observasi terhadap dokumen–dokumen pendukung.

Analisis regresi variabel moderasi atau Moderated Regression Analysis (MRA) digunakan untuk mengetahui peran suatu variabel moderasi akan dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Penelitian ini menggunakan uji interaksi yang berfungsi untuk menganalisis apakah suatu variabel moderasi mengandung unsur interaksi (penggabungan dua atau lebih variabel independen). Persamaan secara matematis sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 M + \beta_5 X_3 M + \mu \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

- α = Konstanta
- Y = Tingkat Kemiskinan
- X_1 = PDRB
- X_2 = Tingkat pengangguran
- X_3 = Investasi
- M = Inflasi
- β_1 = Koefisien regresi dari produk domestik regional bruto (X_1)
- β_2 = Koefisien regresi dari Tingkat Pengangguran (X_2)
- β_3 = Koefisien regresi dari Investasi (X_3)
- β_4 = Koefisien regresi dari Inflasi (X_4)
- β_5 = Koefisien regresi dari interaksi Investasi dan Inflasi (X_3, M)
- e = Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam regresi moderasi melakukan pengujian dengan meregresi variabel produk domestik regional bruto, pengangguran, investasi, dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan, serta antara PDRB, pengangguran, investasi, dan inflasi sebagai variabel moderasi terhadap tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara dan Papua agar mendapatkan nilai koefisien regresi masing-masing variabel dengan menggunakan program SPSS.

Tabel 2.
Hasil Uji MRA

Model		Unstandardized Coefficients		T	Sig
		B	Std.Error		
1	(Constant)	76.354	15.273	4.999	.000
	PDRB	-3.499	1.183	-2.958	.006
	Pengangguran	-1.774	.911	-1.947	.061
	Investasi	3.096	1.226	2.525	.017
	Inflasi	-1.414	.363	-3.894	.001
	Interaksi	-.398	.264	-1.507	.142

R² = 0,545

F = 7.176

Sig = 0,000

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 2 didapatkan persamaan model regresi sebagai berikut.

$$\hat{Y} = 76.354 - 3.499 X_1 - 1.1774 X_2 + 3.096 X_3 - 1.414X_4 - 0.398 X_3 X_4$$

Uji Normalitas berfungsi untuk menguji apakah dalam residual model regresi yang dibuat berdistribusi normal atau tidak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Hasil uji normalitas dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3.
Hasil Uji Normalitas (Kolmogorov-Smirnov)

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{ab}	Mean	DE-7
	Std. Deviation	4.51247226
Most Extreme Difference	Absolute	0,153
	Positive	0,153
	Negative	-0,081
Kolmogorov-SmirnovZ		0,916
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,370

Sumber: Data diolah, 2020

Hasil pengujian statistik menggunakan program SPSS ternyata model residual berdistribusi normal. Hal ini bisa diketahui dari nilai statistik Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,916 dengan Sig. (2-tailed) sebesar 0,370 yang lebih besar dari 0,05. Oleh karena model residual berdistribusi normal, maka model layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Metode ini adalah meregres variabel bebas terhadap absolute residual. Uji heteroskedastisitas akan ditampilkan pada Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		T	Sig
		B	Std.Error		
1	(Constant)	12.364	9.257	1.336	.192
	PDRB	-.676	.717	-.943	.353
	Pengangguran	-.023	.552	-.041	.967
	Investasi	-1.008	.743	-1.356	.185
	Inflasi	-.413	.220	-1.874	.071
	Interaksi	.072	.160	.452	.654

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan hasil olahan data dengan SPSS diketahui nilai signifikansi (Sig) untuk variabel PDRB, Pengangguran, Investasi, Inflasi, dan Interaksi adalah lebih besar dari 0,05 maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji glejser, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heterosedastisitas dalam model regresi.

Hasil analisis uji statistik dengan menggunakan program SPSS diperoleh nilai F_{hitung} sebesar $8.071 > F_{tabel}$ sebesar 2,90 dan signifikansi F_{hitung} sebesar $0,000 < \alpha = 5$ persen atau 0,05, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, ini berarti bahwa variabel PDRB, pengangguran, investasi, dan inflasi berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara dan Papua.

Berdasarkan nilai t_{hitung} sebesar $-3.425 < t_{tabel}$ sebesar 1,693 dan signifikansi T_{hitung} sebesar $0,002 < \alpha = 5$ persen atau 0,05, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, Ini berarti bahwa variabel PDRB (X_1) secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara dan Papua.

Berdasarkan nilai t_{hitung} sebesar $-2,478 < t_{tabel}$ sebesar 1,693 dan signifikansi T_{hitung} sebesar $0,019 < \alpha = 5$ persen atau 0,05, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, ini berarti bahwa variabel pengangguran (X_2) secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara dan Papua.

Berdasarkan nilai t_{hitung} sebesar $2.080 > t_{tabel}$ sebesar 1,693 dan signifikansi T_{hitung} sebesar $0,046 < \alpha = 5$ persen atau 0,05, maka H_0 diterima dan H_1 dditolak, ini berarti bahwa variabel investasi (X_3) tidak berpengaruh negatif secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara dan Papua.

Berdasarkan nilai t_{hitung} sebesar $-3.521 <$ dari t_{tabel} sebesar $1,693$ dan signifikansi T_{hitung} sebesar $0,001 <$ dari $\alpha = 5$ persen atau $0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak ini berarti bahwa variabel inflasi (X_4) tidak berpengaruh positif secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara dan Papua.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara dan Papua, Artinya apabila PDRB meningkat maka akan mampu menurunkan tingkat kemiskinan akan berkurang. Hasil ini sesuai dengan teori Kuznet (2001), pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya dilakukan Priyo (2015), Yang berjudul “Analisis Pengaruh Pendidikan, PDRB Perkapita dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali” dalam penelitiannya menyatakan apabila PDRB meningkat maka pendapatan masyarakat akan meningkat, sehingga tingkat kemiskinan akan turun terlebih apabila PDRB tinggi lebih bagus dan kemiskinan semakin berkurang. dimana hasil penelitiannya terdapat pengaruh negatif antara produk domestik regional bruto terhadap kemiskinan yang dilakukan di Provinsi Bali pada tahun 2007 hingga 2013.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara dan Papua. Artinya kelompok pengangguran yang terjadi di Nusa Tenggara dan Papua ini

tidak serta merta merupakan golongan kelompok miskin, karena kelompok pengangguran tersebut masih memiliki anggota lain untuk menyokong kehidupan mereka atau bahkan berasal dari keluarga tidak miskin serta merupakan kelompok pengangguran yang sedang mencari pekerjaan. Hasil penelitian ini bertolak belakang dari teori menurut Sadono Sukirno (2004), menurutnya efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Teori dari Sadono Sukirno diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Seran (2017) yang berjudul “Hubungan Antara Pendidikan, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kemiskinan” dalam penelitiannya sama-sama menyatakan pengangguran memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan, dimana apabila jumlah pengangguran meningkat akan mengurangi pendapatan masyarakat yang nantinya akan menjerumuskan masyarakat terhadap taraf hidup yang rendah dan berpotensi menjerumuskan kedalam lingkaran kemiskinan.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara dan Papua. Artinya investasi yang terjadi di Nusa Tenggara dan Papua tidak berimbas untuk menambah jumlah lapangan kerja bagi masyarakat sehingga masyarakat yang tenaganya terserap untuk berkerja sedikit Sugiyarto (2017), Guntur and Raldi H. Koestoer (2005), Investasi yang memiliki nilai tinggi tetapi tidak memiliki output

untuk menghasilkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat tidak memiliki pengaruh yang besar guna mengurangi kemiskinan Sunariyah (2003). Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Ambara Ratih (2015) dan Novita Arshanti (2015), yang berjudul “Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Dan Tingkat Kemiskinan Pada Wilayah Sarbagita Di Provinsi Bali” dimana terdapat hubungan pengaruh negatif antara investasi terhadap tingkat kemiskinan.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara dan Papua. Artinya inflasi memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Ketika permintaan terhadap barang komoditas dan jasa meningkat relatif lebih tinggi dari penawarannya, maka permintaan tenaga kerja pun akan meningkat seiring kebutuhan perusahaan memproduksi produknya lebih banyak. Upah sebagai pendapatan masyarakat secara nominal juga meningkat dan mendorong daya beli masyarakat menjadi lebih tinggi Maggi (2013). Ketika daya beli masyarakat secara nominal meningkat, pasar akan bereaksi dengan naiknya harga komoditas dan jasa secara umum (inflasi) Sarah (2017). Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Meinny Kolibu (2019) yang berjudul “Pengaruh Tingkat Inflasi, Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara” menyatakan inflasi merupakan determinan makro ekonomi bagi perubahan kondisi kemiskinan disuatu negara. Penduduk miskin tidak akan terpengaruh pada tingkat inflasi karena

pada dasarnya penduduk miskin tidak mempunyai daya beli , sehingga walaupun terjadi inflasi mereka tetap tidak punya daya beli . Hasil penelitian ini didukung dengan teori Phillips (2001) dimana hukum permintaan dan penawaran digunakan.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh bahwa inflasi memoderasi pengaruh investasi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia Timur. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Abdul Latif Hamzah (2018) yang mengatakan inflasi sebagai variabel moderasi akan dapat memperkuat hubungan investasi terhadap tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara dan Papua.

Implikasi kebijakan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara dan Papua yaitu produk domestik regional bruto memiliki peranan dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia Timur. Apabila suatu keadaan perekonomian meningkat dari adanya lapangan usaha yang menghasilkan barang maupun jasa guna meningkatkan PDRB memiliki perannya, dimana tingkat kemiskinan akan berangsur-angsur menurun karena peningkatan lapangan pekerjaan. Permasalahan yang timbul ke permukaan berkaitan dengan pesatnya pertumbuhan penduduk adalah ketidak seimbangan antara pertumbuhan lapangan pekerjaan dengan semakin bertambahnya tenaga kerja setiap tahunnya. Hal ini akan menimbulkan kelebihan penawaran tenaga kerja dibandingkan dengan permintaannya, sehingga fenomena ini memunculkan adanya pengangguran.

Menurut Sadono Sukirno (2000) kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat.

Inflasi dapat didefinisikan sebagai kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus menerus, atau bisa juga disebut gejala ketidak seimbangan antara jumlah uang yang beredar dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia Totonchi (2011), jumlah uang yang beredar lebih besar dibanding dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia. Apabila peningkatan inflasi meningkat secara terus-menerus secara cepat akan mendorong mundurnya pertumbuhan ekonomi, Inflasi yang tinggi berimbas kepada harga-harga barang sehingga masyarakat enggan menggunakan uangnya untuk melakukan transaksi karena mahal nya harga barang.

SIMPULAN

Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Nusa Tenggara dan Papua. Pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara dan Papua. Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara dan Papua. Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara dan Papua dan inflasi memoderasi pengaruh investasi terhadap tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara dan Papua.

Penelitian ini memperlihatkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Nusa Tenggara dan Papua. Oleh karena peningkatan Produk Domestik Regional Bruto yang mampu menurunkan tingkat kemiskinan diharapkan pemerintah dapat membuat kebijakan atau lebih mendukung usaha-usaha yang berpotensi guna meningkatkan pendapatan masyarakat.. Pada penelitian ini memperlihatkan bahwa investasi berpengaruh positif

dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara dan Papua artinya Nilai investasi yang meningkat diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga masyarakat yang masih menjadi pengangguran dapat terserap dan mampu menghasilkan pendapatan guna mensejahterakan hidupnya. Pemerintah perlu memberi perhatian yang lebih terkait kemiskinan di Nusa Tenggara dan Papua Sinerginya informasi dan kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan dapat lebih mengoptimalkan hasil yang diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara dan Papua.

REFERENSI

- Alcock, Pete. 2012. *Poverty and Social Exclusion. The Student's Companion to Social Policy. Fourth Edition* Hal 48-55
- Alghofari, Farid. 2010. Analisis tingkat pengangguran Di Indonesia Tahun 1980-2007. *Jurnal Universitas Diponegoro Semarang. Vol. 1 no. 1 2007*
- Ambara Ratih, Gusti Ayu Putu dan Made Suyana Utama. 2015. Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Dan Tingkat Kemiskinan Pada Wilayah Sarbagita Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan (2017): 29-54*
- Arsyad, Lincolin. 1999. *Ekonomi Pembangunan. Edisi Keempat*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Hal 57-63
- Abdul Latif Hamzah. 2018. Pengaruh pengangguran dan investasi dengan inflasi sebagai Variable moderasi terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Bagian Timur tahun 2009-2017, *Jurnal Universitas Diponegoro Semarang* Hal 18-25
- Badan Pusat Statistik dan Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan, 2016, Pemetaan Kemiskinan Kecamatan, Jakarta : Badan Pusat Statistik dan Pusdatin – Departemen Sosial RI.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2016, Data dan Informasi Kemiskinan, Nusa Tenggara Barat: Badan Pusat Statistik.
- Boediono. 2001. *Ekonomi Makro*, Yogyakarta. Hal 120

- Carvalho, Luciana., Avelar, Ana Paula Macedo de. 2016. Innovation and Productivity: empirical evidence for Brazilian industrial enterprises. *Revista De Administracao*. 52 hal 34-147.
- Clark, Todd E. 2004. An Evaluation of the Decline in Goods Inflation. *Journal Economic Review-Federal Reserve Bank of Kansas*. 89(2): h: 19-51.
- Coxhead, Ian and Muqun Li. 2008. Prospects For Skills-Based Export Growth In a Labour-Abundant, Resource-Rich Developing Economy. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 44, No. 2, 2008: 209–38
- Di Tella, Rafael, Robert J. MacCulloch and Andrew J. Oswald. 2001. "Preferences over Inflation and Unemployment: Evidence from Surveys of Happiness." *American Economic Review*. Vol, 91, No. 1, 2001: 335-341
- Dr. Aurangzeb. 2013. Factors Effecting Unemployment: A Cross Country Analysis *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, Vol. 3, No. 1. 220-277
- Fajrii. Muhammad, Arman Delis, dan Yohanes Vyn Amzar. 2016. Dampak Otonomi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Keterbukaan Daerah terhadap Ketimpangan Wilayah di Sumatra. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. [S.l.], jan. 2017. ISSN 2303-0186.
- Halim Alamsyah , Charles Joseph , Juda Agung & Doddy Zulverdy. 2010. Towards Implementation Of Inlation Targeting In Indonesia. *Jounal Bulletin Of Indonesia Economic Studis* Vol. 37, No. 3, 2001: 309–24
- Hendra Kusuma. 2016. Desntralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol 9, No 1, 88-97
- Imelia. 2012. Pengaruh Inflasi terhadap Kemiskinan di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika* Vol 1, No 5, 31-47
- Jhingan, M.L. 2007. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal 220
- Li. Muqun. 2008. Indonesia in Comparative Perspective Series Prospects For Skills-Based Export Growth In A Labour-abundant, Rource-rich Developing Economy. *Journal Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 44, No. 2, 2008: 199–228
- Maipita, Indra. 2014. *Memahanmi dan Mengukur Kemiskinan*, Cetakan I. Yogyakarta: Penerbit Absolute Media. Vol. III, No. 3, 2017: 324 – 344

- Mahsunah, Durrotul. 2013. Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Jawa Timur. (*Jurnal. Universitas Negeri Surabaya*). Vol 1 No 3, 5-15
- Mankiew, N Gregory. 2000. *Teori Makroekonomi* Edisi Keempat Jakarta erlangga.
- Margareni, Ni Putu Ayu Purnama, Djayastra. I Ketut, Murjana Yasa. I.G.W. 2016. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Provinsi Bali. *Jurnal Piramida Vol.XII No.1 100:-110 ISSN :1907-3275*
- Meinny Kolibu, Vekie A. Rumate, Daisy S.M. Engka. 2019. Pengaruh Tingkat Inflasi, Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara. *E-Jurnal Ekonomi Universitas Sam Ratulangi..*
- Mudrajad Kuncoro. 1997. *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 15.
- Mudrajad Kuncoro. 2001. Metode Kuantitatif: *Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi kesatu, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Muhammad Umair. 2013. I Impact of GDP and Inflation on Unemployment Rate: A Study of Pakistan Economy in 2000-2010 *International Review of Management and Business Research Vol. 2*
- Meinny Kolibu, Vekie A. Rumate, Daisy S.M. Engka Pengaruh tingkat inflasi ,investasi,pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sulawesi utara 2013. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Magister Ilmu Ekonomi Universitas Sam Ratulangi
- Novita Arshanti, Kadek dan I.G.A.P. Wirathi. 2015. Pengaruh Investasi Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Mediasi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Unud*. Vol. 4, No. 5, 2015 Hal 514-525
- Ocaya, Bruno., Charles Ruranga & William Kaberuka. 2012. Dynamic Relationship between Gross Domestic Product and Domestic Investment inRwanda. *World (Journal of Education, 2(6). Makerere University, Urganda)*. Vol. 2, No. 6 Hal 79-85
- Paramita, Anak Agung Istri Diah. 2015. Pengaruh Investasi dan Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Kemiskinan di Provinsi Bali. *E-jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 4, No. 10 Hal 12-23

- Priyo Adi Nugroho. 2015. Pengaruh PDRB, Tingkat Pendidikan, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kota Yogyakarta Tahun 1999-2013. *Jurnal Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Rejekiingsih, Tri Wahyu 2012. Konsentrasi Ekspor Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan, [S.l.], oct. 2012. ISSN 2303-0186*.
- Rio Maggi dan Birgitta Dian Saraswati. 2013. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Inflasi Di Indonesia Model Demand Pull Inflation Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol 6, No 2, Hal 66-77
- Sadono Sukirno. 2000. Makro Ekonomi Modern: *Perkembangan Pemikiran dari Klasik sampai Keynesian*. Lembaga Penerbit FE-UI. Jakarta. 18.
- Sirilius Seran, 2017. Hubungan Antara Pendidikan, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan, [S.l.], may 2017. ISSN 2303-0186*.
- Sjafrizal. 2012. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Solow, R.M. 1956. A Contribution to the Theory of Economic Growth. *The Quarterly Journal of Economics*. Vol.70 (1). pp.65-94.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 2010. *Makroekonomi. Teori Pengantar*. Edisi Ketiga. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sugiyarto, Guntur and Raldi H. Koestoer. 2005. "Investment Climate in Indonesia: The Main
- Sarah Xue Dong and Chris Manning. (2017). Labour-Market Developments at a Time of Heightened Uncertainty. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. The Australian National University.
- Totonchi, E.P. 2011. Laboring A Democratic Spring: the Past, Present and Future of Free Trade Unions in Egypt. *Working USA: The Journal of Labor and Society*, 14:259-283.
- Zang, Wenyu dan Mark Baimbridge. 2012. Exports, imports and economic growth in South Korea and Japan: a tale of two economies. *Journal Of Economic Development*. 44(3):361-372

ZamiZami. 2015. Analisis pengaruh produk domestik regional bruto dan jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten nangan raya (*E-Jurnal ekonomi*). Volume 1 Nomor 1 Hal 39-57